

SANKSI UNI EROPA TERHADAP RUSIA ATAS PELANGGARAN TERITORIAL UKRAINA: PENDEKATAN MULTI-TUJUAN

Faisal Nurdin Idris¹, Muhammad Rafif Mu'tashim²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹faisal.nurdin@uinjkt.ac.id

Abstract

Sanctions or restrictive measures have become a useful tool of the European Union's Foreign and Security Policy (CFSP) in responding to Russia's violation of Ukraine's territorial integrity. While there are shortcomings in existing literature on how the EU as a supranational organization imposes sanctions, this article provides accounts of going beyond the rigid behavioral change approach. Drawing from the multi-purpose approach, highlighting three functions of sanctions, namely coercing, constraining, and signaling/stigmatizing, we argue that these three functions of sanctions can better explain the imposition and extension of EU sanctions on Russia during the period from 2014-2016. If coercive sanctions seem to be less likely to work in changing Russia's behavior in a given context, constraining sanctions and signaling/stigmatizing sanctions can take a greater role in suppressing Russia both to a domestic audience and the international community, stigmatizing or isolating Russia for violating international norms and law.

Keywords: Sanctions; European Union (EU); Russia-Ukraine Conflict, Foreign Policy Instruments

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, Uni Eropa (UE) secara progresif telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Rusia. Penjatuhan sanksi ini merupakan respon UE atas tindakan pelanggaran Rusia atas integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina dengan menganeksasi secara ilegal wilayah Krimea dan destabilisasi wilayah Ukraina Timur (Council of the EU, 2014a). Sanksi UE terhadap Rusia meliputi sanksi diplomatik, sanksi individual (pembekuan aset dan pembatasan perjalanan), pembatasan hubungan ekonomi dengan Krimea dan Sevastopol, sanksi ekonomi yang menargetkan pertukaran dengan Rusia di sektor ekonomi tertentu, dan pembatasan hubungan kerja sama ekonomi (Council of the EU, 2023a, 2023b, 2023c, 2023e).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Dewan Eropa pada 2014, Herman Van Rompuy, sanksi UE ini bertujuan untuk menghentikan tindakan Rusia dan mengembalikan kedaulatan Ukraina (Council of the EU, 2014a). Pada 19 Maret 2015, UE menyelaraskan durasi penerapan sanksi dengan implementasi secara penuh Perjanjian Minsk yang menjadi resolusi damai bagi penyelesaian konflik di Ukraina (European Council, 2015). Jika perjanjian ini belum diimplementasikan maka UE akan melakukan perpanjangan sanksi terhadap Rusia. Dalam kurun waktu sejak sanksi pertama UE atas pelanggaran kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial oleh Rusia diterapkan pada awal Maret 2014 hingga akhir 2016, UE telah memperpanjang atau memperbaharui tindakan restriktif (sanksi) terhadap Rusia (European Commission, 2023).

Kajian mengenai sanksi UE terhadap Rusia dibutuhkan karena literatur yang ada terlihat masih kurang. Pertama, Rusia yang menjadi negara target sanksi merupakan negara kekuatan besar (*great power*) ditinjau dari kekuatan material seperti militer dan ekonomi (DiCicco & Onea, 2023; Kausikan, 2023). Bahkan Rusia juga merupakan satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Target negara dengan status kekuatan besar tentunya memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda terlebih PBB sejak tahun 1966 menerapkan sanksi kepada negara yang cenderung kurang kuat (*less powerful*). Kedua, absennya negara kekuatan besar dari sanksi PBB tidak meredupkan penggunaan sanksi dalam politik internasional. Di sini, UE sebagai organisasi supranasional dapat menerapkan sanksi terhadap negara kekuatan besar. Namun kajian mengenai penerapan sanksi oleh EU sebagai entitas supranasional masih kurang dan literatur sebagian besar masih berfokus pada sanksi yang diprakarsai atau didukung oleh Amerika Serikat (Weber & Schneider, 2022). Ketiga, serangkaian sanksi UE, diperpanjang atau diperbaharui, terhadap Rusia atas pelanggaran kedaulatan Ukraina sejak tahun Maret 2014 menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi UE. Di sisi lain, kajian terkini tentang sanksi menunjukkan bahwa penggunaan sanksi oleh PBB, UE dan AS sebagai instrument kebijakan

dalam merespon krisis internasional semakin meningkat (Bapat et al., 2013; Weber & Schneider, 2022). Oleh karena itu, fokus terhadap penerapan sanksi UE terhadap Rusia tahun 2014-2016 diharapkan dapat membantu memahami mengapa UE tetap memberlakukan perpanjangan sanksi terhadap Rusia. Tinjauan periode ini dapat berimplikasi dalam mengkaji penerapan sanksi UE terhadap Rusia pasca invasi besar-besaran Rusia atas Ukraina pada akhir Februari 2022.

Tulisan ini dibagi menjadi enam bagian. Bagian pertama mendiskusikan dan memetakan literatur sanksi internasional yang didominasi perdebatan mengenai efektivitas sanksi. Bagian kedua menjelaskan kerangka analisis yang digunakan dalam tulisan ini yang berfokus kepada fungsi sanksi sebagai *coercing*, *constraining* dan *signaling/stigmatizing*. Uraianya juga mencakup ekspektasi teoritis dari ketiga fungsi sanksi tersebut. Bagian ketiga membahas instabilitas dan aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia yang ini menjadi pemicu diterapkannya sanksi UE. Bagian keempat mengilustrasikan bentuk-bentuk sanksi UE terhadap Rusia. Bagian kelima menampilkan adanya perbedaan sikap antar negara anggota terhadap sanksi UE terhadap Rusia. Bagian terakhir menganalisa efektivitas dari perpanjangan sanksi UE terhadap Rusia pada kurun waktu 2014-2016.

Literatur Sanksi Internasional: Efektivitas Sanksi

Sanksi internasional masih menjadi instrumen diplomasi penting yang digunakan baik oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi supranasional yaitu Uni Eropa (UE), ataupun sebuah atau sekelompok negara kepada target penjatuhan sanksi. Terlihat adanya konsensus antar negara kekuatan besar Barat bahwa sanksi khususnya ekonomi masih menjadi alat yang ampuh dalam mengatasi persoalan/krisis besar kebijakan luar negeri. Kajian mengenai sanksi pun mengalami perkembangan. Akan tetap, perdebatan akademik tentang sanksi sejak awal hingga dewasa ini masih didominasi dengan perdebatan utama

yaitu efektivitas sanksi, apakah sanksi berhasil atau tidak? (*success or failure?*).

Dalam diskusi efektivitas sanksi, kita bisa mengelompokkan dua kubu utama yang berlawanan yaitu mereka yang memiliki pandangan 'optimis' dan 'pesimis' tentang efektivitas sanksi Schmitt (2016). Kelompok dengan pandangan sanksi optimis, seperti Baldwin (1999), berargumen bahwa sanksi dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan mengkritik mereka yang memandang sanksi tidak berhasil karena mengadopsi definisi yang sempit mengenai keberhasilan sanksi. Sebaliknya, kelompok yang berpandangan sanksi pesimis, seperti Pape (1997), meragukan kegunaan sanksi karena sedikit bukti empiris bahwa sanksi dapat mencapai tujuan kebijakan luar negeri.

Perdebatan dua kubu di atas dipicu setidaknya oleh dua hal. Pertama, walaupun ilmuan telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan sanksi (Bapat et al., 2013), namun konsep sanksi untuk mendefinisikan atau menentukan keberhasilan sanksi masih belum diterima secara umum (Gadjanova, 2012). Kedua, adanya kekeliruan dari pendekatan perubahan perilaku (*behavioural change approach*) yang kaku dan ini berimplikasi pada asumsi yang keliru (Giumelli, 2013) yaitu: (1) logika ekspektasi penderitaan (*the pain-gain logic*) kepada target sanksi. Sanksi harus memberikan dampak beban ekonomi pada target; (2) pendekatan yang digerakkan oleh tujuan (*a goal-driven approach*) yaitu mengamati apakah sanksi telah mencapai tujuan kebijakan atau tidak atau beraasumsi bahwa sanksi dapat dikaitkan dengan pencapaian tujuan kebijakan; dan (3) asumsi bahwa semua target adalah sama dalam memperoleh kepatuhan (*compliance*). Sebut saja satu contoh dari penjelasan terkait kekeliruan asumsi di atas. Logika ekspektasi penderitaan (*the pain-gain logic*) kepada target sanksi justru dapat kontra produktif yaitu sanksi bisa memberikan efek '*rally around the flag*' yaitu menguatnya dukungan rakyat terhadap penguasa kontra kekuatan asing (Dreyer & Luengo-Cabrera, 2015).

Kerangka Analisis: Fungsi Sanksi sebagai *Coercing*, *Constraining* dan *Signaling/Stigmatizing*

Untuk keperluan tulisan ini, penulis mengadopsi kerangka analisis dalam mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi, bagaimana sanksi bekerja, dan pengaruh sanksi UE terhadap Rusia dengan pendekatan multi-tujuan (*multi-purpose approach*) yang mencakup tiga fungsi sanksi yaitu: *coercing*, *constraining*, dan *signaling* (Giumelli, 2013, 2016; Giumelli et al., 2021), namun ketiga logika itu tidak saling eksklusif. Pertama, aspek koersif dari sanksi (*coercing*) bertujuan utama agar target mengubah perilakunya, sering juga meminta target untuk memenuhi serangkaian tuntutan yang dinyatakan secara eksplisit dalam aturan formal. Target diharapkan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan pemberi sanksi, walaupun ini tidak menjamin bahwa target memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam dokumen resmi dari yang menjatuhkan sanksi. Bentuk sanksi dalam kategori koersif mencakup tindakan pembatasan (*restrictive measures*) dan embargo yang ini dapat memberikan pengaruh kerusakan atau penderitaan terhadap target yang mengubah kalkulasi biaya/manfaat (*cost/benefits calculation*) untuk mengubah perilaku target (Giumelli, 2013; Veebel & Markus, 2015). Traktat UE (TEU) memberikan basis hukum bagi UE dalam penerapan sanksi yang menjadi instrument kebijakan luar negeri UE (*The Common Foreign and Security Policy/CFSP*).

Kedua, sanksi *constraining* bertujuan untuk membatasi dan mempersulit kehidupan individu atau entitas dengan secara materi membatasi kemampuan target untuk bertindak. Strategi koersif dari sanksi UE tidak selalu membebankan biaya dan juga tidak selalu mendorong perubahan perilaku target. Sehingga strategi sanksi bersifat *constraining* diperlukan. Aspek sanksi pembatasan (*constraining*) meliputi serangkaian langkah untuk mempersulit target melalui pembatasan akses kepada sumber daya penting (*essential resources*) seperti dana/keuangan, persenjataan, dan barang. Dalam kasus Rusia, aksi agresif terhadap Ukraina mendorong UE membatasi akses perusahaan milik negara dan swasta ke pasar keuangan.

Namun tingkat perdagangan yang tinggi dan relasi ekonomi lainnya seperti sektor energi dan keuangan antara UE dan Rusia menjelaskan mengapa sanksi UE terhadap Rusia atas Ukraina mungkin masih terbatas dalam memberikan dampak keparahannya terhadap Rusia, karena faktanya bahwa sanksi UE terhadap Rusia justru dapat merugikan UE/pemberi sanksi (Dreyer & Luengo-Cabrera, 2015). Namun demikian, sanksi pembatasan ini dapat memberikan efek jera (*detering effect*) untuk menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang (Veebel & Markus, 2015).

Terakhir, sanksi *signaling* tidak bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi terhadap target/penerima sanksi, walaupun dapat juga memiliki dampak material tidak langsung berupa hilangnya investasi asing langsung, namun lebih diarahkan kepada audiens domestik agar mereka mengambil mereka mengambil tindakan, dan kepada audiens internasional terkait dengan citra dan juga mengirimkan pesan kepada aktor lainnya. Aspek *signaling* ini adalah tentang menegaskan kembali norma dan hukum internasional (seperti, menghormati kedaulatan negara lain), serta menstigmatisasi target sanksi sehingga meningkatkan isolasi internasional dari komunitas internasional, negara dan entitas non-negara atau individu kepada target (Dreyer & Luengo-Cabrera, 2015; Giumelli, 2013; Veebel & Markus, 2015). Dalam kasus Rusia, sanksi UE dapat diartikan dengan mengirim pesan ketidaksetujuan atas pelanggaran Rusia terhadap integritas teritorial Ukraina. Menurut Veebel dan Markus (2015), fungsi sanksi dalam mengirim pesan kepada audiens internasional dan atau domestik dapat juga dimaknai sebagai alat dalam perang komunikasi di mana sanksi ditujukan untuk ‘mempermalukan’ (Adler-Nissen, 2014) dan menstigmatisasi negara target.

Pendekatan multi-tujuan (*multi-purpose approach*) yang mencakup tiga fungsi sanksi setidaknya memiliki empat kegunaan (Giumelli, 2013). Pertama, pendekatan ini dapat lebih eklektis melampaui pendekatan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan berbagai cara di mana sanksi dapat mempengaruhi peristiwa internasional. Kedua, pendekatan

multi-tujuan ini memberikan atensi kepada konteks dan karakteristik target sanksi. Ketiga, karena Ketika logika fungsi di atas tidak terpisah satu sama lain, kompleksitas rezim sanksi (*comprehensive, targeted sanctions, dan smart sanctions*) dapat diurai agar lebih komprehensif. Keempat, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efek sanksi seperti yang diharapkan oleh yang menerapkan sanksi, sehingga ini dapat membantu ekspektasi yang tepat mengenai kontribusi sanksi dalam kebijakan luar negeri.

PEMBAHASAN

Instabilitas dan Aneksasi Wilayah Ukraina oleh Rusia

Setelah Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych (Pro-Rusia), diturunkan dari jabatannya saat terjadinya peristiwa Revolusi *Euromaidan* di Ukraina, Rusia melakukan okupasi militer di wilayah Krimea. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Rusia pada saat proses okupasi militer antara lain adalah mengambil alih instalasi militer, memblokade pelabuhan di Laut Hitam, mendukung milisi lokal pro-Rusia, dan mengambil alih bandara di Sevastopol dan Simferopol (Bilkova, 2015, p. 32; Wilson, 2014, p. 111). Rusia juga menggantikan pemerintah yang berwenang di Krimea dengan pemerintahan pro-Rusia (Geiß, 2015).

Dewan Nasional Tertinggi Republik Otonomi Krimea pada 11 Maret 2014 mendeklarasikan bahwa wilayahnya akan memerdekakan diri dan bergabung dengan Federasi Rusia melalui referendum (Geiß, 2015). Referendum kemudian dilaksanakan pada 16 Maret 2014 dan menghasilkan perolehan suara setuju sebanyak 96,7% (Wilson, 2014). Perjanjian akses Krimea ke dalam kesatuan wilayah Federasi Rusia ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 18 Maret 2014 bersama dengan Konstantinov (Ketua Dewan Negara Republik Krimea), Sergei Aksyonov (Perdana Menteri Republik Krimea) dan Alexei Chaly yang merupakan Ketua Dewan Koordinasi untuk pembentukan pemerintahan kota Sevastopol (President of Russia, 2014).

Selain menganeksasi Krimea, Rusia juga melakukan intervensi konflik di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Ketidakstabilan politik di wilayah Donbas terjadi saat peristiwa Revolusi Euromaidan berlangsung. Pada bulan April 2014, muncul gerakan separatisme yang memproklamkan diri dengan mendirikan dua negara yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk (Fischer, 2019). Pemerintahan sementara Ukraina yang berkuasa menganggap bahwa gerakan tersebut adalah bentuk tindakan terorisme sehingga melancarkan operasi anti-teroris ke wilayah separatis tersebut (Fischer, 2019). Akibat adanya perlawanan, konflik antara pihak separatis dengan pemerintah Ukraina pun terjadi dan memanas.

Selama konflik berlangsung Rusia memberikan dukungan kepada pihak separatis. Salah satu bentuk dukungan Rusia yakni memberikan bantuan melalui personil militer. Rusia mengirimkan angkatan darat Rusia yang terdiri dari unit infanteri, artileri, lapis baja, pertahanan udara, dan pengintaian udara. Pasukan lintas udara juga dikirimkan dan terlibat dalam kelompok penyerangan dan kelompok pendukung pada pertempuran di Ilovaisk, Debaltseve, dan Bandara Donetsk. Rusia juga mengerahkan pasukan khusus yang dilibatkan dalam operasi pengintaian dan sabotase serta membantu merebut gedung-gedung administrasi, menyerang fasilitas militer Ukraina, dan meyergap konvoi militer. Rusia mengerahkan angkatan laut-nya yang terlihat aktif di wilayah konflik. Pertahanan Nasional Rusia juga dikirimkan ke wilayah konflik yang bertugas melatih pasukan bersenjata ilegal. Selain itu Pasukan udara Rusia juga dikirimkan untuk bertugas menjaga keamanan lapangan udara dan pengendalian ruang udara (Balaban et al., 2017).

Tidak hanya personil militer, Rusia juga mendukung separatis melalui dukungan materil. Rusia memberikan bantuan kepada pihak separatis berupa suplai senjata beserta amunisinya dan juga beberapa peralatan militer lain. Beberapa bentuk bantuan materil antara lain kendaraan mobilitas infanteri, kendaran pembawa personil lapis baja, tank tempur utama, truk lapis baja, truk militer, sistem peluncuran roket ganda, radar

pengintai medan perang, sistem rudal permukaan-ke-udara taktis, sistem rudal dan senjata permukaan-ke-udara, stasiun radio, kendaraan komando, sistem EW, dan UAV (Balaban et al., 2017).

Berdasarkan tindakan Rusia melakukan aneksasi secara illegal atas wilayah Krimea dan intervensi konflik di wilayah Donbas ini pada akhirnya UE memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, berikut juga perpanjangan atau pembaharuan sanksi tersebut. Pada periode awal (2014-2016), tindakan restriktif UE terhadap Rusia mencakup penerapan sanksi diplomatik berupa dihentikannya pertemuan regular Uni Eropa-Rusia, sanksi individual berupa pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, pembatasan hubungan ekonomi dengan Krimea dan Sevastopol, sanksi ekonomi yang menargetkan sektor finansial, pertahanan dan energi, dan pembatasan hubungan kerja sama ekonomi dengan Rusia (Council of the European Union, 2020).

Sanksi ekonomi diterapkan UE pada 31 Juli 2014, ditandai dengan diadopsinya Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan mulai berlaku sejak 1 Agustus 2014 (Council Decision 2014/512/CFSP). Keputusan UE untuk menjatuhkan sanksi ekonomi adalah respon terhadap destabilisasi wilayah Donbas yang dilakukan Rusia. Dalam Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, UE meminta agar Rusia menghentikan peningkatan aliran senjata, peralatan, dan militan melintasi perbatasan untuk mencapai hasil de-eskalasi yang cepat dan nyata serta mendesak Rusia untuk menarik pasukan tambahannya dari daerah perbatasan.

Bentuk-bentuk Sanksi UE terhadap Rusia

Sanksi ekonomi UE terhadap Rusia terbagi menjadi empat bentuk. Bentuk pertama adalah pembatasan akses bank-bank dan perusahaan-perusahaan Rusia tertentu ke pasar modal primer dan sekunder UE. Negara anggota dilarang melakukan penjualan dan pembelian secara langsung dan tidak langsung, menjadi perantara atau membantu transaksi lainnya yang berkaitan dengan obligasi, ekuitas atau instrumen keuangan serupa. Ini diberlakukan kepada lembaga kredit utama atau lembaga keuangan yang

didirikan Rusia, setiap badan hukum yang didirikan di luar UE dengan lebih dari 50% kepemilikannya dimiliki oleh beberapa badan yang ditargetkan oleh sanksi ini, dan transaksi dengan badan hukum yang bertindak atas nama-nama badan tersebut. Badan-badan yang menjadi target sanksi adalah Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank, dan Rosselkhozbank (Council of the EU, 2014b).

Bentuk kedua adalah larangan impor dan ekspor persenjataan dan peralatan militer lainnya. Negara anggota dilarang untuk menjual, menyuplai, mentransfer, dan mengekspor senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan suku cadangnya kepada Rusia melalui warga negara atau dari wilayah negara anggota maupun melalui kapal dan pesawat dengan bendera mereka (negara anggota). Negara anggota juga dilarang memberikan pembiayaan, bantuan pembiayaan, bantuan teknis, layanan perantara atau layanan lain yang terkait dengan kegiatan militer dengan Rusia. Berlaku pula larangan mengimpor, membeli, dan mengangkut senjata dan perlengkapan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan suku cadangnya, dari Rusia (Council of the EU, 2014b).

Bentuk ketiga adalah larangan ekspor barang dan teknologi penggunaan ganda (*dual-use goods*). Negara anggota dilarang menjual secara langsung ataupun tidak langsung, memasok, mentransfer ataupun mengekspor barang penggunaan ganda dan teknologi kepada Rusia. Barang penggunaan ganda yang dimaksudkan adalah perangkat lunak dan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil maupun untuk tujuan militer yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Dewan/*Council Regulation* (EC) No 428/2009 tanggal 5 Mei 2009 (Council Regulation (EC) No 428/2009). Sanksi ketiga ini juga mencakup larangan memberikan pembiayaan, bantuan pembiayaan, bantuan teknis, layanan perantara atau layanan lain yang terkait barang penggunaan ganda dan teknologi (Council Decision 2014/512/CFSP).

Bentuk keempat adalah pembatasan akses Rusia ke teknologi dan layanan tertentu yang dapat digunakan untuk produksi dan eksplorasi minyak. Negara anggota dilarang menjual, memasok, mentransfer ataupun mengekspor beberapa teknologi tertentu yang digunakan baik dalam ekspolarasi dan produksi minyak laut dalam, ekspolarasi dan produksi minyak arktik, dan proyek minyak serpih Rusia. Larangan yang diberlakukan termasuk juga dalam hal memberikan pembiayaan, bantuan pembiayaan, bantuan teknis, layanan perantara atau layanan lain yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan untuk produksi dan eksplorasi minyak. Pihak yang berwenang dari negara-negara anggota juga tidak diperbolehkan memberikan otorisasi apapun untuk penjualan, penyediaan, pengalihan atau ekspor teknologi atau penyediaan layanan yang ditujukan untuk eksplorasi dan produksi minyak di Rusia (Council Decision 2014/512/CFSP).

Pada 11 September 2014, sanksi ekonomi UE diperkuat dengan cara memperluas cakupan sanksi yang berhubungan dengan sektor finansial dengan menambahkan tiga perusahaan besar pertahanan Rusia dan tiga perusahaan besar energi Rusia (Council of the EU, 2014c). Cakupan sanksi yang berhubungan dengan barang dan teknologi penggunaan ganda juga diperluas dengan menambahkan sembilan perusahaan pertahanan campuran.

Pada 19 Maret 2015, UE memutuskan untuk menyelaraskan durasi penerapan sanksi dengan implementasi secara penuh Perjanjian Minsk (European Council, 2015). Apabila isi perjanjian ini belum diimplementasikan secara menyeluruh maka UE akan memperpanjang sanksinya selama 6 bulan. Keputusan untuk memperpanjang sanksi diambil oleh Dewan Eropa dan diformalisasikan dalam prosedur tertulis setelah mendapatkan dukungan suara bulat (*unanimously*) dari negara-negara anggota. Sedangkan ketentuan perpanjangan sanksi ekonomi tercantum pada pasal 9(2) dari Keputusan Dewan 2014/512/CFSP yang diadopsi pada 31 Juli 2014.

Akan tetapi di dalam prosesnya, Rusia dianggap tidak secara penuh menjalankan poin-poin dalam Perjanjian Minsk yaitu 13 poin perdamaian dan beberapa ini poin yang harus dilakukan Rusia sebagai bentuk implementasi antara lain menarik mundur pasukan dan persenjataan Rusia, memastikan formasi militer lokal yang dibentuk meletakkan senjata mereka untuk menjamin tercapainya gencatan senjata, dan memberikan kembali Pemerintah Ukraina kontrol penuh atas perbatasan negaranya dengan Rusia (Zoria & Shandra, 2018). Semua poin-poin tersebut belum diimplementasikan secara penuh oleh Rusia meskipun berada di bawah tekanan perpanjangan sanksi UE.

Mengabaikan implementasi Perjanjian Minsk, Rusia beralasan bahwa negaranya justru berperan sebagai mediator, bukan pihak yang berkonflik (Atland, 2020). Pemerintah Rusia menyangkal jika pasukan Rusia yang membantu separatis di Donbas merupakan perintahnya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan jika pasukan tersebut datang dan membantu separatis secara '*voluntarily*' (sukarela), mengikuti kata hati mereka sendiri (Nilsson, 2016). Alasan Kedua adalah Rusia menginginkan agar proses perdamaian di Ukraina dimulai dari diimplementasikannya poin-poin Perjanjian Minsk yang harus Pemerintah Ukraina penuhi.

Perbedaan Sikap antar Negara Anggota terhadap Sanksi UE

Selain sanksi tidak bisa menghentikan tindakan Rusia terhadap Ukraina, dalam implementasinya UE juga mendapatkan tantangan dari internal organisasi supranasional itu sendiri yaitu adanya polarisasi antar negara anggota UE terkait perbedaan sikap mengenai sanksi terhadap Rusia. Terdapat fakta jika tidak semua negara anggota mendukung penerapan sanksi terutama sanksi ekonomi terhadap Rusia. Perbedaan posisi negara terkait sanksi UE terhadap Rusia dapat dicontohkan melalui posisi Polandia yang mendukung sanksi, posisi Yunani yang tidak mendukung sanksi, dan posisi Prancis yang cenderung berada di antara keduanya (*in-between*) terkait sikapnya terhadap Rusia (Portela et al., 2021).

Polandia adalah salah satu negara anggota UE yang sangat mendukung penerapan sanksi. Polandia menjadi negara yang mendukung proses integrasi Ukraina ke dalam keanggotaan UE sehingga beranggapan bahwa UE perlu bersikap tegas atas pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah yang dilakukan Rusia atas Ukraina (Baranowski & Cichocki, 2015). Bahkan sanksi UE yang telah diterapkan adalah salah satu hasil upaya Polandia saat berunding pada pertemuan-pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota UE (Gotev & Kokoszcy?ski, 2014). Dukungan Polandia terhadap sanksi dipengaruhi oleh munculnya perasaan terancam atas tindakan Rusia yang berani menggunakan kekuatan militer untuk merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Bagi Polandia, mendukung sanksi adalah salah satu kebijakan luar negeri prioritas untuk melindungi wilayah perbatasan timur negaranya (Portela et al., 2021).

Yunani merupakan salah satu negara anggota yang paling vokal menyuarakan ketidaksetujuan dengan sanksi UE terhadap Rusia. Yunani setuju untuk membantu mengembalikan perdamaian dan kestabilan Ukraina, namun penggunaan sanksi internasional hanya akan membuat retak hubungan antara UE dan Rusia (Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs, 2015). Pada 2015 Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, mengatakan bahwa negaranya tidak sepakat dengan penggunaan sanksi terhadap Rusia karena tidak efisien dan bisa membawa perang dingin baru dengan Rusia (Walker, 2015). Ketidaksetujuan Yunani terhadap sanksi bahkan juga tercermin dari masyarakat domestiknya. Berdasarkan survey yang diadakan oleh Gallup pada 2015, sebanyak 62% warga negara Yunani menyatakan tidak mendukung sanksi dan 45% warga negara Yunani percaya bahwa sanksi telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya (Esipova & Ray, 2015).

Prancis adalah negara anggota yang berkontribusi secara aktif untuk membantu menyelesaikan konflik di Ukraina. Bersama dengan Jerman, Perancis terlibat dalam format negosiasi seperti *Weimar Triangle* dan Format Normandia, serta menjadi mediator pada negosiasi Minsk 1 dan 2. Posisi

Prancis terhadap sanksi dapat dikatakan berada dalam posisi yang cenderung seimbang, tidak mendukung dengan kuat namun juga tidak mengkritik atau memprotes kebijakan sanksi UE. Perancis mendukung sanksi yang diterapkan oleh UE seperti yang dikatakan pada *website* Kementerian Luar Negeri Perancis (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2022). Akan tetapi pada kesempatan tertentu Presiden Hollande juga menginginkan agar sanksi terhadap Rusia dicabut apabila terdapat kemajuan dalam proses perdamaian di Ukraina. Sanksi UE dan embargo Rusia berikutnya telah merugikan banyak perusahaan Prancis dan Eropa (BBC, 2015). Namun apabila Rusia belum menghormati proses perdamaian di Ukraina maka Perancis akan tetap mendukung keberlanjutan sanksi. Sikap Perancis ini salah satunya disebabkan oleh kepercayaan Perancis bahwa tujuan sanksi bukanlah untuk mendorong politik dan ekonomi Rusia ke dalam kekacauan (Kramer, 2015).

Analisis mengenai Efektivitas Perpanjangan Sanksi UE terhadap Rusia 2014-2016

Deskripsi di atas memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi UE dalam mengubah perilaku Rusia atas Ukraina. Di sisi lain, penerapan sanksi justru diperpanjang dan diperluas sasarannya. Sebagaimana ulasan teoritis di atas, secara konseptual sanksi memiliki lebih dari satu fungsi yang dapat dilihat melalui pendekatan *multi-purpose approach*. Menurut pendekatan ini, sanksi dapat bekerja melalui tiga cara yaitu *coercing* (memaksa target mengubah perilakunya), *constraining* (membatasi target), dan *signaling* (memberi pesan) (Giumelli & Ivan, 2013).

Dalam kasus Rusia, sanksi ekonomi dapat dilihat melalui fungsi *coercing*. Sanksi bekerja dengan memberikan kerusakan (*damage*) pada target agar memperhitungkan kembali untung/rugi dalam melaksanakan suatu kebijakan (Giumelli, 2013). Fungsi *coercing* ini terlihat jelas pada sanksi UE terhadap Rusia sejak awal diterapkan karena sanksi memiliki tujuan untuk mempengaruhi Rusia agar menghentikan tindakannya di

Ukraina dan mengembalikan kedaulatan Ukraina, atau dapat dikatakan memaksa Rusia untuk mengubah perilakunya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada 19 Maret 2015 UE memutuskan untuk mengaitkan durasi penerapan sanksi dengan sejauh mana Perjanjian Minsk diimplementasikan oleh Rusia, dan apabila perjanjian tersebut gagal diimplementasikan secara menyeluruh dalam periode tertentu maka UE akan melakukan perpanjangan terhadap sanksi-sanksinya. Keputusan ini menunjukkan jika perubahan perilaku Rusia merupakan landasan utama dalam bagi UE dalam merespon perilaku Rusia. Oleh karena itu fungsi *coercing* adalah fungsi yang paling dominan karena menjadi inti dari penerapan dan perpanjangan sanksi.

Namun demikian pada realitasnya sejak sanksi diterapkan dan diperpanjang hingga tahun 2016, fungsi *coercing* ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, tujuan sanksi untuk menghentikan tindakan Rusia dan mengembalikan kedaulatan wilayah Ukraina tidak tercapai. Poin-poin dalam Perjanjian Minsk sebagai resolusi damai bagi konflik di Ukraina juga belum diimplementasikan penuh oleh Rusia. Pelanggaran terhadap gencatan senjata sebagai poin utama dalam Perjanjian Minsk terlihat nyata. Bahkan berdasarkan laporan dari OSCE, pada 2019 telah terjadi pelanggaran gencatan senjata sebanyak 299.633 kali (OSCE, 2020), namun infografis laporan tersebut tidak mengurai secara spesifik bentuk pelanggarannya.

Fungsi *coercing* dari sanksi UE terlihat kurang realisasinya. Ini sebagian disebabkan adanya kesulitan dalam memaksa Rusia agar mengimplementasikan Perjanjian Minsk. Sebaliknya, Rusia menyangkal negaranya berperan sebagai pihak yang berkonflik. Rusia juga baru mau mengimplementasikan poin-poin Perjanjian Minsk apabila Pemerintah Ukraina melaksanakan poin yang harus diimplementasikan oleh Ukraina terlebih dahulu.

Terlepas dari fungsi koersif, sanksi ekonomi terhadap Rusia dapat memperlihatkan fungsi *constraining*. Melalui fungsi ini sanksi ditujukan

untuk untuk mengurangi atau mengacaukan kapabilitas target untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu (Giumelli, 2013). Sanksi juga berfungsi untuk membuat 'hidup' target menjadi lebih sulit ketika target tidak memenuhi tuntutan atau keinginan pemberi sanksi (Giumelli & Ivan, 2013). Fungsi ini terlihat pada sanksi ekonomi yang dijatuhkan secara spesifik menargetkan tiga sektor strategis Rusia yaitu di bidang finansial dengan membatasi akses bank-bank dan perusahaan-perusahaan Rusia tertentu ke pasar modal primer dan sekunder UE. Di bidang pertahanan, sanksi UE diterapkan dengan embargo militer dan pembatasan ekspor terhadap barang penggunaan ganda untuk tujuan militer. Di bidang energi, UE menerapkan sanksi dengan membatasi akses Rusia kepada teknologi dan layanan tertentu yang digunakan dalam produksi dan eksplorasi minyak (Council of the EU, 2023b).

Penerapan sanksi ekonomi yang ditargetkan kepada tiga sektor strategis Rusia diputuskan sejak fase awal. Ketika masa berlaku sanksi ekonomi mendekati akhir batas waktu, Rusia terlihat belum memenuhi tuntutan UE. Sepanjang tahun 2016-2019, sanksi ekonomi UE terhadap Rusia telah diperpanjang sebanyak delapan kali karena Rusia tidak memenuhi persyaratan pencabutan sanksi. Namun, dampak sanksi ekonomi sulit untuk diukur secara akurat karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Ada estimasi jika pada 2014-2017 sanksi UE telah berkontribusi pada pengurangan Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia sebesar 2-2,5% (Gurvich, 2018). Sedangkan *International Monetary Fund* (IMF) mengestimasi jika sanksi telah mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi Rusia pertahunnya sebesar 0,2% pada 2014-2018 (Korhonen, 2019). Dari data tersebut dampak sanksi ekonomi terhadap penurunan GDP Rusia dapat dikatakan tidak begitu signifikan. Namun memang pada dasar perancangan sanksi ekonomi tidak ditujukan untuk menimbulkan dampak *catastrophic* bagi ekonomi Rusia agar tidak terlalu berdampak negatif pada keseluruhan populasi Rusia. Sanksi juga dirancang agar dampak negatif yang diterima Rusia harus lebih besar dibandingkan dampak negatif yang

dirasakan UE agar tidak menimbulkan gangguan kestabilan perekonomian UE (Christie, 2016).

Di sisi lain, dampak sanksi terhadap sektor-sektor yang menjadi sasaran sanksi memiliki pengaruh terhadap Rusia dalam jangka menengah dan panjang. Di sektor pertahanan, sanksi ekonomi telah menyebabkan kelangkaan barang-barang tertentu yang dibutuhkan dalam industri pertahanan Rusia. Meskipun Rusia adalah negara yang mandiri dalam produksi persenjataan dan peralatan militer lainnya, sebanyak kurang lebih 640 jenis barang yang dibutuhkan dalam industri pertahanan Rusia adalah teknologi hasil impor dari negara-negara UE dan NATO (Russell, 2016). Sanksi di sektor ini menyulitkan Rusia mendapatkan barang pengganti sehingga dalam jangka menengah dan panjang sanksi ekonomi di sektor pertahanan ini akan menyebabkan industri pertahanan Rusia tertinggal dengan industri kompetitor dari negara lain.

Dampak sanksi ekonomi pada sektor finansial dapat terlihat pengaruhnya dengan jelas terhadap perekonomian Rusia. Sanksi UE menutup akses bank-bank dan perusahaan-perusahaan besar Rusia ke pasar keuangan UE. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan Rusia dipaksa untuk membayar kewajiban utang luar negeri mereka pada jangka waktu yang pendek dan dalam skala masif. Seperti pada tahun 2014, total pembayaran hutang luar negeri Rusia yang harus dibayarkan sebesar 104 miliar dollar AS (European Parliament, 2014). Sanksi menyebabkan peningkatan yang signifikan pada arus modal keluar dan terjadi pengurangan modal yang tersedia untuk mendanai investasi dalam ekonomi yang lebih luas (Connolly, 2015). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan-perusahaan dan bank-bank besar Rusia baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang apabila UE dan negara barat lainnya masih melakukan perpanjangan terhadap sanksi-sanksinya.

Di sektor energi, sanksi memberikan dampak dalam jangka menengah dan panjang. Untuk menjalankan proyek perminyakan dan mempertahankan produktivitas, perusahaan besar minyak Rusia pada

umumnya membutuhkan teknologi dan pelayanan dari perusahaan-perusahaan barat seperti Schlumberger, Baker Hughes, dan Halliburton (Russell, 2016). Dengan diterapkannya sanksi membuat perusahaan Rusia terkendala dalam mendapatkan akses kepada teknologi dan pelayanan dari hasil kerja sama dengan Barat. Kesulitan untuk mencari teknologi dan pelayanan pengganti akan memberikan dampak pada pengurangan produktivitas perusahaan minyak besar Rusia di jangka menengah dan panjang.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat jika sanksi ekonomi yang dijatuhkan UE tidak untuk memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Rusia. Akan tetapi sanksi akan mempengaruhi sektor-sektor spesifik tertentu dan memberikan dampak secara bertahap pada jangka menengah dan panjang untuk melemahkan sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu fungsi *constraining* adalah fungsi sanksi yang jelas teridentifikasi pada sanksi ekonomi UE dan perpanjangan sanksi ekonomi akan melemahkan Rusia dalam jangka panjang dan diharapkan dapat menekan Rusia mengubah tindakannya terhadap Ukraina.

Terkait dengan fungsi *signaling/stigmatizing* yaitu sanksi berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat kepada audiens atau komunitas internasional dan menstigmatisasi target. Sanksi dapat memiliki makna simbolik berupa pesan ketidaksetujuan pemberi sanksi kepada penerima sanksi atas tindakan yang dianggap telah melanggar norma dalam hubungan internasional. Dengan menggunakan sanksi ekonomi, UE memberi pesan kepada komunitas internasional bahwa UE tidak setuju dan mempersuasi komunitas internasional agar memberikan kecaman kepada Rusia. UE juga memberi pesan internasional bahwa UE tidak mentolerir pelanggaran integritas teritorial seperti yang dilakukan oleh Rusia atas Ukraina. Tindakan aneksasi ilegal wilayah Krimea dan destabilisasi wilayah Donbas oleh Rusia menjadi salah satu isu keamanan yang mendapat atensi serius oleh UE karena secara geografis pelanggaran Rusia atas Ukraina berada di perbatasan teritori dengan UE. Tindakan yang dilakukan Rusia tersebut

menunjukkan bahwa negaranya tidak lagi menerima universalitas aturan hukum, norma dan institusi yang menopang tatanan keamanan Eropa pasca-Perang Dingin (Mankoff, 2016). Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam Perjanjian Helsinki tahun 1975, yaitu menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan independensi negara lain (Pifer, 2017). Perilaku Rusia ini tentu beralawanan dengan prinsip UE sebagai organisasi internasional yang memegang kuat prinsip dan norma internasional dengan menghormati hukum internasional.

Penjelasan ketiga fungsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi UE sebenarnya tidak hanya memiliki satu tujuan atau fungsi koersif yaitu perubahan sikap Rusia. Akan tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang bekerja dikala fungsi *coercing* tidak begitu berpengaruh pada negara pewaris Uni Soviet tersebut. Terdapat fungsi *constraining* yang berfungsi melemahkan sektor strategis Rusia dalam jangka menengah dan panjang apabila Rusia tidak mengubah sikapnya dengan cara memperpanjang sanksi. Dengan mempertahankan sanksi yang berlaku, UE memberikan pesan atau isyarat (*signaling*) kepada komunitas internasional bahwa UE konsisten dalam menyuarakan ketidaksetujuan atas perilaku Rusia yang dianggap melanggar norma internasional (*stigmatizing*). Fungsi stigmatisasi ini juga mengucilkan Rusia dari interaksi masyarakat internasional.

KESIMPULAN

Sanksi UE terhadap Rusia atas pelanggaran integritas teritorial Ukraina merupakan instrumen kebijakan luar negeri UE (CFSP) dalam merespon perilaku Rusia. Tulisan ini mengeksplorasi mengapa sanksi masih menjadi opsi kebijakan yang diterapkan dalam merespon tindakan Rusia atas Ukraina. Dengan menggunakan pendekatan multi-tujuan (*multi-purpose approach*), tulisan menunjukkan bahwa penerapan dan perpanjangan sanksi UE terhadap Rusia pada periode 2014-2016 tidak hanya bisa ditinjau dari aspek koersif. Dari uraian di atas, kami berargumen bahwa ketiga fungsi sanksi yaitu *coercing*, *constraining* dan *signaling/stigmatizing* berperan pada konteks yang berbeda. Jika fungsi koersif dianggap kurang bekerja dalam

mengubah perilaku Rusia dalam satu keadaan tertentu, fungsi *constraining* dan *signaling/stigmatizing* dapat lebih mengambil peran dalam menekan Rusia baik kepada audiens domestik ataupun internasional. Kajian ini dapat memberikan implikasi bagi kajian berikutnya dalam menginvestigasi tetap digunakannya sanksi yang diperluas dalam merespon invasi Rusia atas Ukraina dengan operasi besar-besaran pada 24 Februari 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler-Nissen, R. (2014). Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and Order in International Society. *International Organization*, 68(1), 143–176.
- Åtland, K. (2020). Destined for deadlock? Russia, Ukraine, and the unfulfilled Minsk agreements. *Post-Soviet Affairs*, 36(2), 122–139. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2020.1720443>
- Balaban, M., Volyanyuk, O., Dobrovolska, C., Balaban, B., & Maiorov, M. (2017). *Donbas In Flames: Guide to the Conflict Zone* (A. Maiorova (ed.)). Lviv: Prometheus.
- Baldwin, D. A. (1999). The Sanctions Debate and the Logic of Choice. *International Security*, 24(3), 80–107. <https://doi.org/10.1162/016228899560248>
- Bapat, N. A., Heinrich, T., Kobayashi, Y., & Morgan, T. C. (2013). Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data. *International Interactions*, 39, 79–98. <https://doi.org/10.1080/03050629.2013.751298>
- Baranowski, M., & Cichocki, B. (2015). Poland: Searching for a Strategic Response. In J. Forbrig (Ed.), *A REGION DISUNITED? Central European Responses to the Russia-Ukraine Crisis*. The German Marshall Fund of the United States (GMF).
- Bazoobandi, Sara. *On target?: EU sanctions as security policy tools*. Paris: EU Institute for Security Studies, 2015.
- BBC. (2015, September 7). *Ukraine conflict: France hopes to end Russia sanctions*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-europe-34174382>
- Christie, Edward H. (2016). The Design and Impact of Western Economic Sanctions against Russia. *The RUSI Journal* 161(3).
- Connolly, R. (2015). The impact of EU economic sanctions on Russia. In I. Dreyer & J. Luengo-Cabrera (Eds.), *On target? EU sanctions as security policy tools*. Paris: EU Institute for Security Studies.
- Council of the EU. (2014a). *Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern Ukraine*. <https://www.consilium.europa.eu/media/22019/144205.pdf>
- Council of the EU. (2014b). *Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine*. The Council of the European Union

- and the European Council. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0833>
- Council of the EU. (2014c). *Reinforced restrictive measures against Russia*. <https://www.consilium.europa.eu/media/21992/144868.pdf>
- Council of the EU. (2023a). *EU response to Russia's invasion of Ukraine*. The Council of the European Union and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/>
- Council of the EU. (2023b). *EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014)*. The Council of the European Union and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>
- Council of the EU. (2023c). *EU sanctions against Russia explained*. The Council of the European Union and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/eu-solidarity-ukraine/>
- Council of the EU. (2023d). *Sanctions: How and when the EU adopts restrictive measures*. The Council of the European Union and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/>
- Council of the EU. (2023e). *Timeline – EU restrictive measures against Russia over Ukraine*. The Council of the European Union and the European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>
- DiCicco, J. M., & Onea, T. A. (2023). *Great-Power Competition*. Oxford Research Encyclopedia of International Studies. <https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-756;jsessionid=EC2715831AA21907FA3BF50BF78B6628>
- Dreyer, I., & Luengo-Cabrera, J. (Eds.). (2015). *On target? EU sanctions as security policy tools*. EU Institute for Security Studies.
- European Council. (2015). *European Council, 19-20 March 2015*. <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/03/19-20/>
- Esipova, Nelie & Ray, Julie. (2015). *Greeks Oppose Economic Sanctions Against Russia*. Gallup. <https://news.gallup.com/poll/184811/greeks-oppose-economic-sanctions-against-russia.aspx>
- European Commission. (2023). *Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures)*. <https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>
- European Parliament. (2014). *European Parliament resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine by Russia (2014/2627(RSP))*. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0248_EN.html

- Gadjanova, E. (2012). Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War. *Swiss Political Science Review*, 18(1), 137–139. <https://doi.org/10.1111/j.1662-6370.2012.02054.x>
- Ginano, R. S., & Riyanto, S. (2022). RUSSIFICATION IN MODERN DAYS : ANALYZING GEORGIA AND UKRAINE SEPARATISTS AS RUSSIA STRATEGY AGAINST NATO'S EXPANSION. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(02), 201-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1171>
- Giumelli, F. (2013). *How EU sanctions work: a new narrative* (129th ed., Issue May). Paris: EU Institute for Security Studies. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Chaillot_12_9.pdf
- Giumelli, F., & Ivan, P. (2013). *The effectiveness of EU sanctions: An analysis of Iran, Myanmar, Belarus, and Syria* (Issue 76). EPC.
- Giumelli, F. (2016). The purposes of targeted sanctions. In T. J. Biersteker, S. E. Eckert, & M. Tourinho (Eds.), *Targeted Sanctions: The Impacts and Effectiveness of United Nations Action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.targeted.sanctions>
- Giumelli, F., Hoffmann, F., & Książczaková, A. (2021). The when, what, where and why of European Union sanctions. *European Security*, 30(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/09662839.2020.1797685>
- Gotev, Georgi dan Krzysztof Kokoszczyski. (2014). *Poland's stake in the Ukraine crisis: hawkish or insightful?*. EURACTIV. <https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poland-s-stake-in-the-ukraine-crisis-hawkish-or-insightful/>
- Gurvich, Evsey. (2018). *Kak pravil'no i nepravil'no otvechat' na sanktsii*. Dikutip dalam Gould-Davies, Nigel. (2018). Economic effects and political impacts: Assessing Western sanctions on Russia. *BOFIT Policy Briefs 8/2018*, Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT).
- Hellenic Republic. (2015). *Foreign Minister Kotzias' interview on AMNA Web TV*. Ministry of Foreign Affairs. <https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/foreign-minister-kotzias-interview-on-amna-web-tv.html>
- Kausikan, B. (2023). *Navigating the New Age of Great-Power Competition: Statecraft in the Shadow of the U.S.-Chinese Rivalry*. Foreign Affairs. <https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-great-power-competition-russia-guide>
- Korhonen, Iikka. (2019). Economic Sanctions on Russia and Their Effects, *CESifo Forum Vol. 20 No. 4*. <https://www.ifo.de/DocDL/CESifo-Forum-2019-4-korhonen-economic-sanctions-december.pdf>
- Kramer, A. E. (2015, January 5). *France's Hollande seeks end to sanctions v Russia*. Australian Financial Review. <https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/france-s-hollande-seeks-end-to-sanctions-v-russia-20150106-12ihpn>
- Mankoff, Jeffrey. (2016). *Russia's Challenge to the European Security Order*. The German Marshall Fund of the United States. <https://www.gmfus.org/news/russias-challenge-european-security-order>

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2022). War in Ukraine: France's diplomatic action. <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/situation-in-ukraine-what-is/>
- Nilsson, Carl Hvenmark. (2016). *Revisiting the Minsk II Agreement: The Art and Statecraft of Russian-Brokered Cease-Fires*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). (2020). *2019 Trends and observations from the Special Monitoring Mission to Ukraine*. Organization for Security and Co-operation in Europe. <https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/444745>
- Pape, R. A. (1997). Why Economic Sanctions Do Not Work. *International Security*, 22(2), 90–136. <https://doi.org/10.1162/isec.22.2.90>
- Pifer, Steven. (2017). *The growing Russian military threat in Europe. Assessing and addressing the challenge: The case of Ukraine*. Brookings. <https://www.brookings.edu/testimonies/the-growing-russian-military-threat-in-europe/>
- Portela, C., Pospieszna, P., Skrzypczyńska, J., & Walentek, D. (2021). Consensus against all odds: explaining the persistence of EU sanctions on Russia. *Journal of European Integration*, 43(6), 683–699. <https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1803854>
- President of Russia. (2014). *Agreement on the accession of the Republic of Crimea to the Russian Federation signed*. Kremlin.Ru. <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20604>
- Russell, M. (2016). Sanctions over Ukraine. Impact on Russia. *European Parliamentary Research Service, March*, 12. <http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-579084-Sanctions-over-Ukraine-impact-Russia-FINAL.pdf>
- Schmitt, O. (2016). International Sanctions. In M. D. Cavelty & T. Balzacq (Eds.), *Routledge Handbook of Security Studies* (2nd ed., pp. 360–370). Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315753393>
- Veebel, V., & Markus, R. (2015). Lessons from the EU-Russia Sanctions 2014–2015. *Baltic Journal of Law and Politics*, 8(1), 165–194. <https://doi.org/10.1515/bjlp-2015-0015>
- Walker, Shaun. (2015). *Alexis Tsipras in Moscow asks Europe to end sanctions against Russia*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/08/alexis-tsipras-in-moscow-asks-europe-to-end-sanctions-against-russia>
- Weber, P. M., & Schneider, G. (2022). Post-Cold War sanctioning by the EU , the UN , and the US: Introducing the EUSANCT Dataset. *Conflict Management and Peace Science*, 39(1), 97–114. <https://doi.org/10.1177/0738894220948729>
- Wilson, Andrew. *Ukraine Crisis: What It Means For The West*. Hampshire: Yale University Press, 2014.
- Zoria, Y., & Shandra, A. (2018). *Everything you wanted to know about the Minsk peace deal, but were afraid to ask*. Euromaidan Press. <https://euromaidanpress.com/2018/02/28/everything-you-wanted-to-know-about-the-minsk-peace-deal-but-were-afraid-to-ask/>